

DAFTAR REFERENSI

A. BUKU

- Ali, Chaidir A. *Hukum Pajak Elementer*, Bandung : PT. Eresco, 1993.
- Azhar Kasim. *Pengantar Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003.
- Boediono. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Diadit Media, 2000.
- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Brotodihardjo. R.Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika, 1998.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi ke-3, Bandung: PT. Eresco, 1991.
- Ismawan, Indra. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- John Hutagaol, Darussalam, Danny Septriadi. *Kapita Selektta Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Judiesseno, Rimsky K. *Pepajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mamudji, Sri, et. al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mansyury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1996.

-----, *Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 1999.

Mardiasmo. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

Safri Nurmantu. *Pengantar Perpajakan*, edisi 3, Jakarta: Granit, 2005.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

Soemitro, Rochmat. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Cet. 1. Bandung: PT. Eresco, 1987.

-----, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, Cet. 3. Bandung: PT. Eresco, 1988

-----, *Asas-asas Hukum Perpajakan, Cet. 1*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1991.

Susilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politesia, tanpa tahun.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*

UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007. LN No. 85 Tahun 2007. TLN No. 4740 Tahun 2007.

-----, *Undang-undang Tentang Pajak Penghasilan*. UU No. 36 Tahun 2008. LN No. 133 Tahun 2008. TLN No. 4893 Tahun 2008.

-----, *Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembedulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan sanksi Administrasi dalam rangka penerapan Pasal 37A undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.*

-----, *Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK. 03/2009 sebagaimana telah diubah terakhir tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembedulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*

-----, *Peraturan Dirjen Pajak No. KEP-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010.*

-----, *Peraturan Dirjen Pajak No. 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. SE-33/PJ/2008 Tata cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan sanksi Administrasi, penghentian Pemeriksaan dan Pengadministrasian laporan terkait dengan penerapan Pasal 37A undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.*

-----, *Peraturan Dirjen Pajak No. 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. 30/PJ/2008 Tentang Tata cara Penyampaian, Pengadministrasian serta penghapusan sanksi Administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi untuk tahun Pajak 2007 dan*

sebelumnya, dan sehubungan dengan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2007.

-----, *Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-34/PJ/2008, Tentang Penegasan Pasal 37A Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Ketentuan Pelaksananya.*

-----, *Pengumuman Dirjen Pajak No. PENG-01/PJ/2008 Tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak (Sunset Policy 2008).*

C. KARYA ILMIAH

Yulianus. *Tesis “Pengelakan terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) dalam Pengalihan Hak-hak Atas Tanah dan atau Bangunan ang didahului dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan Kuasa Jual yang dibuat Dihadapan Notaris di Kotamadya Jakarta Utara”*. Depok: 2007.

Juni Anton. *Tesis “Pengaruh Pemeriksaan Rutin Pajak Terhadap Pajak Terutang Wajib Pajak Badan”*. Jakarta: 1999.

Illiyyina Perdanawati. *Skripsi ”Analisis Implementasi Sunset Policy 2008: Studi di KPP Pratama Jakarta Tebet”*. Depok: 2008.

Ria Eva Lusiana. *Skripsi “Kajian Atas Formulasi Sunset Policy melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga”*. Depok: 2008.

D. ARTIKEL

Harian Umum KOMPAS. *Batas Waktu “Sunset Policy” Diperpanjang*, Jakarta: 31 Desember 2008.

Harian Umum KOMPAS. *Sunset Policy Hasilkan Rp 5,56 Triliun*, Jakarta: Jum'at, 30 Januari 2009.

Harian Umum KOMPAS. *Basis Pajak Meluas*, Jakarta: Rabu, 4 Maret 2009.

Harian Kontan. “*Ada Kesempatan Kedua, Tidak Ada Peluang Ketiga*”, Minggu 1 Januari 2008.

Majalah Berita Pajak. *Kepatuhan Pajak dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: 15 september 2006, No. 157, Tahun XXXIV.

----- . *Antara Tax Amnesty dan Sunset Policy*, Jakarta: 15 Juli 2008, No. 1613, Vol. XL, .

----- . *Sunset Policy, Stimulus dan Penerimaan*, Jakarta: 15 Maret 2009.

Majalah Indonesian Tax Review. “*Sunset Policy: Anugerah di Balik Tenggelamnya Matahari*”, Jakarta: Vol I/ edisi 12/ 2008.

----- . *Menakar Implementasi Cetak Biru Ditjen Pajak*, Jakarta: Vol VI/edisi 23/2007

E. PUBLIKASI INTERNET

Agus Kuncoro. *Sunset Policy*, 15 Januari 2009. <<http://sunset%20policy/55-sunset-policy-dan-tidur-nyenyak.html>>.

Bisnis Indonesia. *Reformasi Pajak belum Selesai*, 30 Juni 2009, <<http://www.Pajak.go.id>>.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. *Wajib Pajak Orang Pribadi*, 29 Juni 2009. <<http://www.Pajak.go.id-informasi-Wajib-Pajak-OP>>.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. *Siaran Pers Sunset Policy (Penghapusan Sanksi Pajak)*, 15 Januari 2009. <[http://www.Depkeu.go.id-sunset-policy-siaran pers 01-07-2008.pdf](http://www.Depkeu.go.id-sunset-policy-siaran-pers-01-07-2008.pdf)>.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. *Siaran Pers, Penerimaan Pajak Sampai Dengan Bulan Maret 2009*, 27 Mei 2009. <[http://www.Depkeu.go.id-sunset-policy-siaran pers 13-04-2009.pdf](http://www.Depkeu.go.id-sunset-policy-siaran-pers-13-04-2009.pdf)>.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. *Siaran Pers, Penerimaan Pajak Bulan Januari 2009, Evaluasi Perpanjangan Sunset Policy dan Stimulus PPh Pasal 21*, 15 Maret 2009. <[http://www.Depkeu.go.id-sunset-policy-siaran pers 04-03-2009.pdf](http://www.Depkeu.go.id-sunset-policy-siaran-pers-04-03-2009.pdf)>.

Dudi Wahyudi. *Blog Pajak Indonesia, Berbagi Pengetahuan dan Pengalaman Tentang Pajak*, 15 Januari 2009. <http://www.pajak.go.id/images/file_artikel/sunset.zip>.

Investor Dailly Indonesia. *Penerimaan Negara ditopang Sunset Policy*, 22 April 2009. <<http://www.Pajak.go.id>>.

Mursandi, *Kumpulan Peraturan Mengenai Sunset Policy*. 15 Januari 2009. <http://www.pajak.go.id/images/file_artikel/sunset.zip>.

Oke Zone. Andina Meryani, *DPR Setujui Perpu Sunset Policy jadi Undang-undang*, 3 Maret 2009 <<http://dpr-setujui-perppu-sunset-policy-jadi-uu.htm>>.

Suara Karya. *DJP Terapkan Kebijakan Sunset Policy*, 15 Januari 2009. <http://www.pajak.go.id/images/file_artikel/sunset.zip>.

F. Lain-lain

Modul Pelatihan Brevet A/B.